



Universitas
Mataram

SUMBER DAYA ALAM, KEBIJAKAN DAN KONFLIK

Oleh Markum

Magister PSDAL Pascasarjana
Unram





Pengantar

Sumber daya alam (SDA) menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Selama pemanfaatannya selaras dengan daya dukung lingkungan, harmoni sosial dapat terjaga. Namun ketika tekanan meningkat — baik dari kependudukan, ekonomi, maupun politik — muncullah potensi konflik.

Kondisi ini bisa terjadi pada semua aspek dan sektor: kehutanan, pertambangan, pertanian, kelautan dan lainnya

Relasi SDA, Kebijakan dan Konflik

- SDA → Diatur dengan Kebijakan → Dipengaruhi Perilaku Manusia → Menghasilkan Dampak → Dapat Memicu Konflik.
- Hubungan ini bersifat dinamis dan seringkali tidak seimbang.
- Dampak memicu respons, melahirkan tindakan-tindakan beragam: Kebijakan, Sosek, politik, kelembagaan



an-akses-belaiar-unram-luncurkan-sall-e-learning-sekaligus-sosialisasi-umen

Ketika SDA Masih Melimpah



SDA Melimpah

Dalam kondisi awal, SDA biasanya cukup memadai. Pemanfaatan dilakukan secara tradisional, lokal, berbasis kebutuhan — menciptakan harmoni ekologis dan sosial. Konflik relatif kecil.



SDA Mulai berkurang

Minat terhadap SDA semakin meningkat, menimbulkan pemanfaatan yang terus menaik, menyebabkan ketersediaan mulai jarang



SDA Jadi perebutan

Ketikan daya dukung SDA mulai menurun, dan permintaan diatas daya dukungnya, timbul perebutan SDA

Dinamika SDA

Dalam proses waktu, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap aspek, yang akan merubah wajah SDA

Tekanan Penduduk

Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan pangan, energi, perumahan, dan layanan dasar. Ketidakseimbangan muncul saat konsumsi melebihi daya dukung SDA.

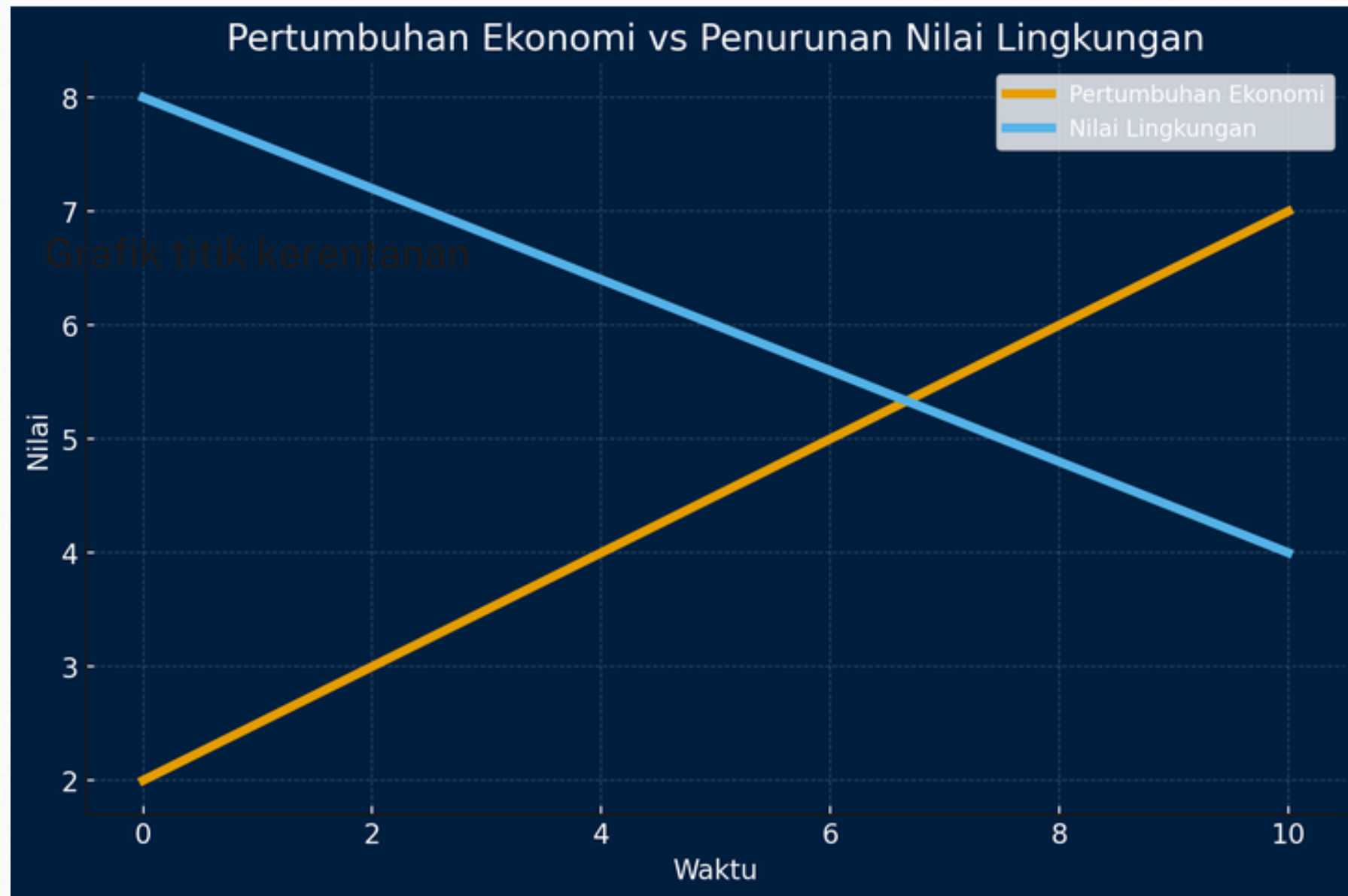
Tekanan Ekonomi dan Pasar

SDA berubah menjadi komoditas bernilai tinggi: tambang, kayu, ikan, energi, pariwisata. Masuknya modal dan kepentingan ekonomi skala besar sering menyingkirkan akses masyarakat lokal.

Dinamika Politik dan Kebijakan

Perubahan rezim dan orientasi pembangunan membuat kebijakan SDA berubah cepat. Contoh: liberalisasi pertambangan, otonomi daerah, konsesi masif, tumpang tindih izin darat-laut.

Kerentanan



Titik Kritis

Kerusakan mulai tampak: deforestasi, pencemaran air, perairan rusak, sedimentasi, dan degradasi pesisir. Kerusakan ini memicu ketegangan sosial — masalah ekologis berubah menjadi masalah politik.

Kebijakan Sebagai Pemicu

Kebijakan yang terlalu pro-investasi, tanpa kajian ekologis dan sosial, sering menjadi pemicu konflik.

Contoh: pemberian izin tanpa FPIC (Free, Prior and Informed Consent) kepada masyarakat adat.

Konflik

Kebijakan yang tujuannya sebagai resolusi konflik, bisa menjadi bagian dari konflik

Contoh Kasus Kebijakan yang menimbulkan Konflik

- Ekspansi izin tambang dan hutan tanaman industri (HTI)
- Kawasan konservasi tanpa dialog lokal
- Alih fungsi lahan tanpa analisis daya dukung
- Perebutan lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal
- Pencemaran sungai & pesisir akibat sedimentasi
- Hilangnya lahan pertanian dan wilayah tangkap nelayan
- Perubahan drastis lanskap dan hilangnya sumber air





Konflik di picu Faktor Perilaku Manusia

Selain kebijakan yang keliru, perilaku masyarakat juga berkontribusi:

- pembukaan lahan berlebihan
- perambahan dan ilegal logging
- pengambilan air tanah tak terkendali
- konflik antar kelompok pengguna
- Ketika perilaku ini tidak diatur, konflik semakin kompleks.

Konflik SDA



01

Scarcity

(kelangkaan SDA)



02

Abundance

(SDA berlimpah dan
diperebutkan banyak
kepentingan)



03

Mal-distribution

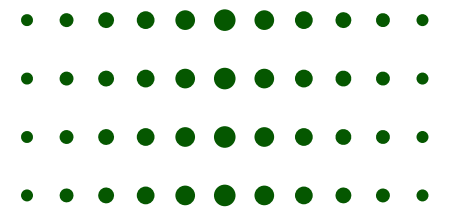
(pembagian akses yang
tidak adil)



04

Weak governance

(kebijakan lemah,
tumpang tindih, minim
pengawasan)



JENIS-JENIS KONFLIK

Ragam konflik bisa dikategorikan berdasarkan jenisnya

 **Konflik masyarakat vs negara**

 **Antar Kelompok Masyarakat: (adat vs pendatang, hulu vs hilir)**

 **Masyarakat vs Perusahaan**

 **Konflik antar sektor (kehutanan vs pertanian, tambang vs perikanan)**



DAMPAK KONFLIK

- Kerusakan lingkungan semakin parah
- Rusaknya hubungan sosial
- Kriminalisasi masyarakat
- Hilangnya pendapatan dan akses
- Meningkatnya kemiskinan dan kerentanan iklim
- Stagnasi pembangunan



MENGAPA KONFLIK BERULANG ?

- Kebijakan tidak berbasis data daya dukung
- Minim partisipasi masyarakat
- Tumpang tindih regulasi lintas sektor
- Pengawasan lemah
- Dominasi kekuatan ekonomi–politik
- Tidak adanya mekanisme keadilan lingkungan



KEBUTUHAN TRANSFORMASI: KEBIJAKAN

Kebijakan harus mengarah ke:

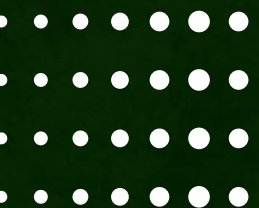
- pengakuan hak lokal
- tata kelola kolaboratif
- pemetaan sosial–ekologis
- pembatasan izin berbasis daya dukung
- transparansi dan akuntabilitas

Tanpa perubahan ini, konflik akan terus berulang.

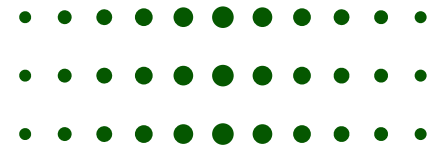
HULU-TENGAH-HILIR KONFLIK SDA



- Hulu: degradasi hutan, perebutan sumber air
- Tengah: intensitas lahan dan tata ruang
- Hilir: banjir, kekeringan, konflik distribusi manfaat
- Konflik SDA selalu terhubung secara sistemik antar wilayah.



PENYELESAIAN KONFLIK SDA



- Mediasi dan negosiasi berbasis adat–lokal
- Penataan ulang kebijakan akses dan izin
- Rehabilitasi ekologi
- Mekanisme bagi hasil yang adil
- Skema kolaboratif multi-pihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha)
- Penerapan prinsip keadilan ekologis



PENUTUP

01

Kebijakan Partisipatif

Perubahan SDA, kebijakan, dan perilaku manusia merupakan rantai sebab-akibat yang kompleks. Ketika salah satu terganggu, konflik muncul.

Solusi hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang adil, partisipatif, dan berbasis daya dukung ekologis.

02

Peran Masyarakat

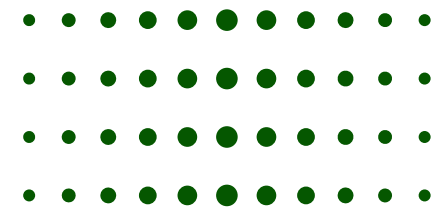
Komunitas lokal sering menjadi pihak yang paling terdampak sekaligus penjaga terakhir SDA.

.....Penguatan kapasitas, partisipasi, dan pemberdayaan
.....menjadi fondasi penyelesaian konflik jangka panjang.
.....





Universitas
Mataram



TERIMA KASIH



087865740044



markumgitu



www.markumgitu.com

